

Komunikasi Strategis dan Propaganda: Peran Media dalam Dinamika Perang Gagasan di Konflik Asimetris

Pratiwi Ika Kartikaningrum¹ F G Cempaka Timur² Ahmad G Dohamid³

Universitas Pertahanan Republik Indonesia^{1,2,3}

Email: pratiwiika1998@gmail.com¹ fg.cempaka@idu.ac.id² ahmaddohamid@gmail.com³

Abstrak

Peran media dalam perang gagasan menjadi faktor yang sangat penting dalam konflik asimetris, dimana kekuatan yang tidak seimbang antara pihak yang terlibat dan penggunaan informasi sebagai alat yang digunakan dalam peperangan menjadi jauh lebih penting. Pada tulisan ini, dapat dilihat bagaimana komunikasi dan manipulasi informasi melalui media dapat menggiring opini, memperkuat posisi politik, dan mengendalikan konflik. Tulisan ini membahas bagaimana strategi manipulatif seperti propaganda, framing, dan disinformasi yang digunakan oleh aktor negara maupun aktor non-negara dapat mendapatkan dukungan publik dan mengilangkan legitimasi musuh. Faktor utama yang dapat memperkuat manipulasi dalam konflik asimetris adalah media sosial yang digunakan untuk menyebarkan informasi secara cepat. Kemudian dalam tulisan ini akan membahas mengenai bagaimana dampak manipulasi informasi terhadap opini publik dan persepsi konflik. Tulisan ini juga menggambarkan dampak dari perang gagasan terhadap kestabilan sosial dan politik.

Kata Kunci: Konflik Asimetris, Perang Gagasan, Manipulasi Informasi, Propaganda, Media Sosial, Framing, Disinformasi, Etika Media, Literasi Media

Abstract

The role of the media in the war of ideas becomes a very important factor in asymmetric conflicts, where the power is not balanced between the parties involved and the use of information as a tool used in warfare becomes much more important. In this paper, it can be seen how communication and manipulation of information through the media can lead opinion, strengthen political positions, and control conflict. This paper discusses how manipulative strategies such as propaganda, framing, and disinformation used by state actors and non-state actors can gain public support and eliminate the legitimacy of the enemy. The main factor that can strengthen manipulation in asymmetric conflicts is social media, which is used to spread information quickly. Then in this paper we will discuss the impact of information manipulation on public opinion and perception of conflict. This paper also describes the impact of the war of ideas on social and political stability.

Keywords: Asymmetric Conflict, War of Ideas, Information Manipulation, Propaganda, Social Media, Framing, Disinformation, Media Ethics, Media Literacy



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

PENDAHULUAN

Dalam era globalisasi dan digitalisasi, perang bukan hanya berbicara tentang perang secara fisik, melainkan sudah merambah ke perang ideologi dan informasi yang dikenal sebagai perang gagasan. Dalam konteks asimetris, yang mana perang terjadi dikarenakan adanya ketidakseimbangan antara kedua belah pihak yang terlibat konflik, perang informasi digunakan untuk mengimbangi kekuatan secara nyata. Salah satunya adalah media, media bukan hanya digunakan untuk menyebarkan informasi secara cepat dan besar namun media juga dapat digunakan untuk menggiring opini dan cara pandang masyarakat untuk memperkuat sebuah narasi politik sehingga dapat melemahkan legitimasi pihak lawan melalui metode manipulasi informasi. Dalam perang asimetris, komunikasi bukan hanya berbicara mengenai penyebaran

informasi secara luas namun termasuk didalamnya ada upaya secara strategis untuk mengendalikan cerita di dalam sebuah konflik dan mempengaruhi cara pandang dari masyarakat. Di dalam sebuah negara tentunya terdapat aktor-aktor baik aktor negara dan aktor non-negara yang menggunakan media sebagai alat utama dalam sebuah peperangan melalui propaganda, framing, hingga disinformasi. Penggunaan teknologi digital, terutama media sosial sering dikaitkan dengan perang informasi ini dimana media memiliki peran khusus untuk menggapai audiens di seluruh dunia dengan cepat dalam penyebaran informasi. Aktor non-negara menggunakan media sosial untuk menyebarkan informasi dan tentunya untuk mendapatkan simpati dan dukungan dari audiens di seluruh dunia hingga mempengaruhi kebijakan publik negara musuh. Manipulasi informasi dalam peperangan asimetris menimbulkan tantangan etis bagi awak media dan media. Tekanan politik dan ekonomi terkadang mengancam kebebasan pers, sehingga mendorong adanya manipulasi informasi yang dapat merusak kepercayaan publik. Kemudian, penyebaran disinformasi secara meluas juga dapat menimbulkan dampak perpecahan dan ketidakstabilan di masyarakat.

Berdasarkan latar belakang diatas maka penelitian ini akan membahas sebagai berikut:

1. Bagaimana strategi manipulatif seperti propaganda, framing, dan disinformasi yang digunakan oleh aktor negara maupun aktor non-negara dapat mendapatkan dukungan publik dan mengilangkan legitimasi musuh?
2. Bagaimana dampak manipulasi informasi terhadap opini publik dan persepsi konflik?

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif deskriptif dengan metode studi kasus dan penelitian ini menggunakan sumber data sekunder. Data yang diperoleh melalui hasil studi literasi atau studi kepustakaan. Sumber data adalah buku maupun jurnal yang melalui proses penelitian dengan topik penelitian yang serupa dengan penelitian ini. Tujuan dari penulisan ini adalah untuk melihat bagaimana komunikasi dan manipulasi informasi melalui media dapat digunakan dalam perang gagasan pada konflik asimetris. Penulisan ini memberikan perspektif mengenai metode-metode dan tantangan etis yang terkait.

Tinjauan Pustaka

Peperangan Asimetris

Perang merupakan sebuah tindakan kekerasan yang memaksa musuh untuk memenuhi keinginan kita (*War is an act of violence intended to compel our opponent to fulfil our will*). Perang merupakan duel dengan skala yang luas (*War is like a duel, but on an extensive scale*). Selain itu, Clausewitz juga mengatakan bahwa perang bukanlah sesuatu yang tunggal, namun perang merupakan kelanjutan politik dengan cara yang lain (*War is the continuation of policy by other means*) (Clausewitz C. , 1995). Michael Gelven juga mengatakan dalam bukunya yang berjudul "*War and Existence* (1994)", perang merupakan konflik bersenjata yang nyata, luas dan disengaja antara komunitas-komunitas politik yang dimotivasi oleh sebuah ketidaksepahaman yang tajam atas pemerintah (*War is intrinsically vast, communal [or political] and violent. It is an actual, widespread and deliberate armed conflict between political communities, motivated by a sharp disagreement over governance*) (Gelven, 1994).

Peperangan asimetris (Asymmetric Warfare) adalah "*Asymmetric warfare is population-centric nontraditional warfare waged between a militarily superior power and one or more inferior powers which encompasses all the following aspects: evaluating asymmetric cost*". Perang asimetris adalah perang non-tradisional yang berfokus pada ketidakseimbangan kekuatan

militer antara negara yang terlibat konflik yang tidak hanya melibatkan operasi militer namun harus memahami aspek budaya dan aspek ekonomi (Buffaloe D. L., 2006). Menurut Dewan Riset Nasional (DRN), perang asimetris adalah model peperangan yang dikembangkan dari cara berpikir yang tidak lazim, berbeda dari aturan peperangan konvensional mencakup aspek-aspek astagatra yang merupakan perpaduan antara trigatra (geografi, demografi, dan sumber daya alam) dan pacagatra (ideologi, politik, ekonomi, sosial, dan budaya). Perang asimetris melibatkan kedua belah pihak yang memiliki ketidakseimbangan antara negara yang memiliki kekuatan militer yang lemah dan negara dengan kekuatan militer yang kuat (Dewan Riset Nasional, 2008). Aktor non-negara seperti kelompok teroris, kelompok pemberontak, atau gerakan separatis akan melakukan peperangan melalui media sosial dan media massa dengan cara menyebarkan isu dan propaganda yang menggambarkan kelompok yang lemah sebagai korban ketidakadilan dari negara yang memiliki kekuatan militer yang kuat. Dengan adanya sosial media dan media massa, informasi akan cepat menyebar secara luas dan global. Berbanding terbalik dengan pemerintah yang berusaha untuk mengendalikan narasi publik dengan menyebarkan informasi terkait dengan kestabilan keamanan nasional dan keberhasilan operasi militer. Namun, upaya ini masih memiliki hambatan dengan adanya propaganda dan disinformasi menyebar secara cepat melalui media massa dan media sosial yang digunakan oleh aktor non-negara guna menimbulkan ketidakpercayaan masyarakat terhadap pemerintah.

Perang Gagasan dan Media

Media sosial adalah platform berbasis digital yang memungkinkan pengguna untuk berbagi pendapat dan perspektif serta bertukar informasi (Harahap, 2020). *Information warfare* merupakan bagian dari perang gagasan. Penggunaan dan manipulasi informasi yang memiliki tujuan untuk mempengaruhi cara pandang, emosi dan keputusan pihak lawan. *Information warfare* menggunakan taktik termasuk disinformasi, propaganda dan serangan siber dan kontrol media sosial. Semua taktik ini bertujuan untuk melemahkan moral dan psikologi lawan, mengurangi kepercayaan publik dan mengendalikan konflik (Handoko, 2019). Dengan adanya internet dan teknologi digital, *information warfare* menjadi alat untuk menyebarkan informasi dengan cepat, dalam jangkauan luas dan dengan dampak signifikan. Negara yang menggunakan *information warfare* memiliki risiko merusak citra pihak yang bertentangan dengan negara tersebut dan dapat menimbulkan kebingungan dan ketidakpercayaan di lingkup masyarakat karena rancunya informasi yang benar dan palsu.

Komunikasi dalam Perang Gagasan

Platform media komunikasi seperti media sosial dan media massa seperti X, Instagram, dan Facebook sering digunakan dalam konteks politik untuk menggalang opini publik. Dalam Jurnal Riset Jurnalistik dan Media Digital mengemukakan bahwa platform ini tidak hanya mengirimkan informasi, melainkan memfasilitasi interaksi langsung antara masyarakat dan pemerintah. Hal ini bisa saja mempengaruhi opini publik melalui berbagai cerita dan informasi yang berkaitan dengan masalah ideologi maupun politik dengan menggunakan sebuah propaganda (Bakry, 2021). Keberhasilan sebuah propaganda didukung oleh pengendalian atau monopoli informasi. Media Massa dan Media Sosial berfungsi sebagai alat yang digunakan untuk menyebarkan narasi politik yang dapat mendukung atau menentang suatu kelompok. Biasanya narasi ini disebar berupa simbol, gambar, cerita, atau rumor untuk menggiring opini publik.

Manipulasi Informasi sebagai Senjata dalam Konflik Asimetris

Teknik-teknik manipulasi informasi dalam membentuk perspektif dan opini publik adalah sebagai berikut:

Disinformasi

Disinformasi atau penyebaran informasi yang tidak benar, palsu, keliru, dan menyimpang secara sengaja dengan tujuan menyesatkan, menipu, dan menimbulkan kebingungan orang yang menerimanya (Fetzer, 2004) (Vlăduțescu, 2014). Fakta yang disajikan dari informasi ini tidak dapat diverifikasi asal usul dan kebenarannya. Terlebih saat ini kita hidup di zaman dengan kemajuan teknologi digital yang memadai sehingga dapat dengan mudah untuk mencari dan mendapatkan informasi. Perlu diketahui bahwa jumlah dari pengguna internet setiap tahun mengalami pelonjakan, hal ini dapat menjadi salah satu faktor yang mendukung peningkatan disinformasi di kalangan masyarakat untuk menggiring opini publik (Najicha, 2020). Misalnya seperti Disinformasi dalam Konflik Suriah. Selama konflik Suriah, kedua belah pihak baik pemerintah maupun kelompok oposisi sering menggunakan disinformasi untuk memengaruhi opini publik dan internasional. Contohnya adalah tuduhan penggunaan senjata kimia, yang sering kali dimanipulasi untuk menyalahkan pihak lain. Video dan gambar yang disebarluaskan melalui media sosial sering kali dimanipulasi atau diambil di tempat dan waktu yang berbeda, tetapi digunakan untuk menggambarkan serangan yang sedang terjadi. Disinformasi ini bertujuan untuk memengaruhi opini internasional dan memobilisasi dukungan atau simpati bagi pihak tertentu.

Propaganda

Propaganda dapat digunakan untuk mempengaruhi pendapat publik dengan menyampaikan informasi yang palsu. Misalnya adalah konflik yang terjadi di Indonesia yakni konflik Papua yang menggunakan Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) untuk menunjukkan cara pandang terhadap kelompok separatis. Hal ini juga disebut sebagai *framing*. *Framing* sendiri adalah teknik dimana media secara tidak langsung membangun sebuah pemahaman di pikiran khalayak melalui wacana di beritanya (Eriyanto, 2002) (Pane, Mendefinisikan OPM dan KKB, 2018). Propaganda digunakan untuk mempengaruhi pendapat publik dengan menyampaikan informasi secara selektif atau palsu. Dalam masalah konflik di Indonesia, ada banyak propaganda keras dan lunak. Misalnya, selama konflik Papua, pemerintah menggunakan istilah seperti "Kelompok Kriminal Bersenjata" (KKB) untuk menunjukkan persepsi tertentu terhadap kelompok separatis. *Framing* adalah teknik di mana "media secara tidak langsung membangun pemahaman di pikiran khalayak melalui wacana beritanya" (Eriyanto, 2006 dalam Pane, 2018).

Framing

Media yang menggunakan *framing* untuk menitikfokuskan bagian tertentu dari suatu peristiwa yang dapat mempengaruhi cara pandang publik. Khususnya untuk pemberitaan konflik yang sedang terjadi. Misalnya, untuk menganalisis konflik Papua, struktur berita dirancang untuk memfokuskan perhatian pada aspek tertentu sehingga pembaca mendapatkan kesan yang diinginkan oleh media. *Framing* didefinisikan sebagai "menyeleksi dan menyoroti hal-hal khusus pada suatu realita, sehingga publik lebih terpaku pada pesan tersebut" oleh media (Pane, Mendefinisikan OPM dan KKB., 2018). Sebagai contoh *framing* dalam Kasus 'War on Drugs' di Filipina. Pemerintahan Rodrigo Duterte memanfaatkan *framing* untuk membentuk opini publik terhadap kebijakan 'War on Drugs' yang keras. Pemerintah membingkai kebijakan

ini sebagai "langkah untuk membersihkan negara dari narkoba dan kriminalitas," fokus pada bagaimana kebijakan tersebut "membawa keamanan" bagi warga. Di sisi lain, media atau kelompok HAM membingkai kebijakan ini sebagai "pelanggaran HAM yang brutal," dengan penekanan pada aspek-aspek seperti pembunuhan di luar hukum dan dampak terhadap hak asasi warga. Kedua framing ini memengaruhi publik untuk melihat kebijakan ini sebagai upaya pemulihan keamanan atau sebagai bentuk kekerasan negara.

Penggunaan Media Sosial untuk Mempengaruhi Opini

Media sosial menjadi platform yang memiliki peran penting untuk menggiring opini publik karena sifatnya yang interaktif dan cepat. Media sosial memiliki fungsi sebagai lahan pertemuan khalayak untuk bertukar berita dan informasi yang terkadang belum dapat di definisikan kebenarannya. Hal ini memicu pemberitaan di media sosial mengandung *framing* dan menimbulkan kebingungan antara fakta atau kabar yang tidak benar (Sabrina, 2018). Dalam konteks etika dan tanggung jawab, manipulasi, propaganda, dan informasi yang benar memiliki beberapa perbedaan terkait dengan metode penyampaian, niat, hingga dampak terhadap publik.

Manipulasi

Ketika sebuah fakta diputarbalikkan dengan sengaja dan dengan maksud menggiring opini publik tanpa mempertimbangkan kebenaran, hal ini dinamakan manipulasi informasi. Karena telah mengabaikan transparansi dan memanfaatkan emosi publik untuk mencapai tujuan politik tertentu yang dianggap tidak etis. Media sosial sering digunakan oleh kelompok guna menyebarkan informasi dengan cepat dan menggunakan psikologi massa yang menerima suatu informasi tanpa proses verifikasi yang cukup (Pariser, 2011). Sebagai contoh, dalam konflik Suriah, manipulasi gambar sering digunakan untuk meningkatkan dampak emosional dari sebuah peristiwa. Misalnya, gambar korban atau kehancuran sering kali diambil dari konteks yang berbeda atau diambil dari konflik lain, namun disajikan seolah-olah terjadi di Suriah. Ini bertujuan untuk menarik simpati internasional atau meningkatkan dukungan bagi pihak tertentu. Manipulasi ini biasanya dilakukan melalui perubahan kecil pada gambar atau video, atau pengambilan gambar dari lokasi dan waktu yang berbeda. Selain itu, proses bantuan kemanusiaan dipengaruhi oleh cara informasi dimanipulasi dalam konflik asimetris. Menurut Fahmi (2019), informasi yang salah tentang keadaan lapangan seringkali menyebabkan bantuan yang tidak tepat sasaran atau tertunda, yang menyebabkan masyarakat sipil menderita lebih lama. Dalam jangka panjang, manipulasi ini dapat merusak masyarakat dan menimbulkan kebencian dan ketidakpercayaan yang sulit disembuhkan bahkan setelah konflik berakhir (Syahrial, 2020).

Propaganda

Propaganda adalah suatu bentuk penyebaran informasi, ide dan juga opini yang digunakan untuk mempengaruhi masyarakat luas tanpa didasari fakta. Propaganda bisa menjadi etis ketika memperhatikan fakta objektif yang bertujuan mendidik. Namun, saat propaganda mencangkup unsur manipulatif dan emosional yang tidak didasari oleh kebenaran dampaknya menjadi tidak etis dan membangun perspektif yang mengarah ke pandangan ekstrem. Misalnya, propaganda sering digunakan untuk membuat orang percaya pada kekerasan sebagai bentuk perlawanan yang legal atau menggambarkan musuh sebagai ancaman utama terhadap kemakmuran dan identitas kelompok. Pada akhirnya, hal ini menyebabkan konflik bertambah parah dan menghambat upaya perdamaian (Nurhadi, 2018).

Propaganda juga sering memicu tindakan ekstrim dan menimbulkan rasa tidak percaya antar-komunitas, memperkuat sekat-sekat sosial dan menyebabkan konflik berlanjut (Rahman, 2020). Propaganda yang dibuat oleh pemerintah dan kelompok separatis di Indonesia memperparah ketegangan dan mempersulit upaya rekonsiliasi (Kusuma, 2019). Dalam konflik asimetris, propaganda cenderung memperburuk perpecahan sosial dan menghambat proses perdamaian (Rahman, 2020, hlm. 78).

Informasi yang Benar

Informasi yang benar didasari oleh fakta yang telah diverifikasi dan disampaikan dengan tujuan mendidik atau memberikan pemahaman kepada publik. Penyampaian informasi yang mengandung tanggung jawab moral yang berarti adanya upaya untuk mengedukasi publik dan membantu mereka agar dapat membuat keputusan berdasarkan data yang akurat. Di Suriah, krisis kemanusiaan telah terjadi karena ketidaksepakatan antara pemerintah, milisi, dan kelompok bersenjata lainnya. Dalam situasi seperti ini, organisasi internasional seperti Human Rights Watch (HRW), Komite Internasional Palang Merah (ICRC), dan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) memainkan peran penting dalam menyediakan publik internasional dengan informasi yang akurat. Laporan yang komprehensif dan objektif memberikan informasi yang benar. Laporan ini menyampaikan fakta tentang korban sipil, kerusakan infrastruktur, dan kebutuhan kemanusiaan yang mendesak. Selain itu, Perserikatan Bangsa-Bangsa memberikan informasi yang akurat tentang kondisi di lapangan melalui berbagai lembaganya, seperti Komisararis Tinggi PBB untuk Pengungsi (UNHCR) dan Organisasi Kesehatan Dunia (WHO). Laporan UNHCR, misalnya, mencakup jumlah pengungsi, status kesehatan mereka, serta kebutuhan logistik dan perlindungan yang mereka butuhkan. Negara-negara donor dan organisasi non-pemerintah dapat menggunakan informasi ini untuk merencanakan bantuan yang sesuai dan tepat sasaran, seperti tempat tinggal, air bersih, dan perawatan medis. Media independen sangat penting untuk memberikan informasi yang benar dalam konflik asimetris. Jurnalis yang bekerja di zona konflik, seperti di Suriah, mengambil risiko tinggi untuk menyampaikan berita yang akurat. Dengan menghindari pemberitaan yang memihak, mereka melaporkan keadaan di medan perang, korban sipil, dan upaya bantuan kemanusiaan. Media yang kredibel, seperti Reuters, BBC, dan The Guardian, mengumpulkan informasi dari berbagai sumber dan memeriksa fakta sebelum menyampaikan berita. Ini sangat penting untuk menghindari penyebaran disinformasi, yang dapat digunakan oleh aktor konflik untuk propaganda.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif deskriptif dengan metode studi kasus. Penelitian ini menggunakan sumber data sekunder. Data yang diperoleh melalui hasil studi literasi atau studi kepustakaan. Sumber data adalah buku maupun jurnal yang melalui proses penelitian dengan topik penelitian yang serupa dengan penelitian ini. Penelitian ini membahas mengenai bagaimana komunikasi dan manipulasi informasi melalui media dapat digunakan dalam perang gagasan pada konflik asimetris, serta analisis filosofis dari fenomena ini.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Aktivitas Strategi Manipulatif oleh Aktor Negara dan Non Negara

Aktor negara dan non-negara kerap kali menggunakan media digital guna mempengaruhi pandangan internasional untuk memajukan kepentingan politik mereka. Negara

memanfaatkan media sosial untuk memperkuat posisi dan pengaruh mereka dan menyebarkan informasi yang relevan guna membentuk opini yang positif tentang kebijakan yang telah diatur mereka. Sebaliknya, aktor non-negara seperti lembaga non-pemerintahan (NGO), organisasi internasional, dan orang-orang yang memiliki pengaruh atas kontribusi diplomasi publik berkompetisi dengan negara dalam pembentukan agenda internasional. Aktor non-negara sering kali menggunakan media guna mendorong masalah seperti Hak Asasi Manusia dan lingkungan yang dapat menempatkan sebuah kebijakan negara tertentu di bawah tekanan. Media sosial memainkan peran penting dalam mendorong perubahan sosial dan politik dalam beberapa situasi untuk menunjukkan kekuatan aktor non-negara dalam mengumpulkan dukungan secara global melalui platform digital (Chakraborty, 2013). Dalam diplomasi publik, penggunaan media dilakukan oleh aktor negara dan aktor non-negara. Hal ini menciptakan lingkungan dimana informasi dan opini dapat menyebar dengan cepat dan luas. Dua masalah yang muncul dengan pendekatan ini adalah kontrol atas narasi dan kemungkinan penyebaran informasi yang keliru harus mempertimbangkan moral dan tanggung jawab mereka untuk menjaga transparansi dan kredibilitas di mata masyarakat internasional. Perbedaan pendekatan propaganda antara aktor negara dan non-negara terutama terkait dengan berbagai teknik dan tujuan. Propaganda adalah alat politik yang sering digunakan oleh negara untuk mempertahankan stabilitas nasional dan menciptakan citra yang positif di mata dunia. Untuk ilustrasi, Indonesia menggunakan berbagai strategi diplomasi publik untuk mengurangi dukungan internasional terhadap kelompok separatis Papua dengan menekankan kemajuan ekonomi dan hak asasi manusia. Selain itu, Indonesia menghadapi kampanye dari kelompok non-negara seperti United Liberation Movement for West Papua (ULMWP), yang didukung oleh negara-negara Pasifik seperti Vanuatu. ULMWP menggunakan masalah HAM dan persamaan etnis untuk menarik perhatian internasional terhadap perjuangan mereka untuk kemerdekaan (Sabir, 2018).

Namun, kelompok non-negara lebih cenderung menggunakan propaganda untuk mendapatkan dukungan di luar negeri dan mendiskreditkan pemerintah negara yang mereka lawan. Mereka sering menggunakan strategi seperti "propaganda hitam", yang menyebarkan informasi yang tidak benar atau dimaksudkan untuk mengelabui audiens tentang sumber dan tujuan informasi tersebut. Misalnya, ULMWP mendapatkan dukungan dan legitimasi internasional dengan memanfaatkan media global dan kelompok. Mereka menyebarkan cerita mereka secara luas melalui platform seperti media sosial (Kementerian Luar Negeri, 2018). Media yang digunakan untuk menyebarkan informasi manipulatif menimbulkan dilema moral yang memengaruhi jurnalisme, media independen, dan masyarakat dalam hal etika. Manipulasi informasi, seperti menyebarkan berita palsu atau melakukan framing berlebihan, mengaburkan perbedaan antara fakta dan pendapat, yang pada akhirnya membahayakan kepercayaan masyarakat terhadap media. Media digital saat ini memungkinkan setiap orang menyebarkan informasi tanpa standar etis atau verifikasi yang ketat, yang menimbulkan tantangan baru untuk akurasi dan objektivitas. Hal ini menyebabkan masalah terkait reputasi media digital dan kepercayaan masyarakat terhadap informasi yang seringkali tidak terverifikasi (Sudirman, 2017) (Paripurna, 2021).

Bagi dunia jurnalisme, pengaruhnya sangat besar. Jurnalis diharapkan untuk menjalankan tanggung jawab sosial mereka dengan tetap jujur dan menghindari praktik yang merugikan, seperti menyebarkan hoaks atau informasi yang tidak valid. Meskipun undang-undang mengatur kebebasan pers, media online yang tidak tunduk pada peraturan ketat kadang-kadang menjadi masalah etis. Untuk menjadi dapat dipercaya, jurnalisme media online

harus konsisten dengan akurasi, verifikasi, dan transparansi. Namun, kebebasan ini juga mengharuskan mereka menghindari menggunakan informasi untuk kepentingan pribadi atau bisnis (Ward, n.d.). Selain memberikan informasi yang benar dan akurat, jurnalis dan media memiliki tanggung jawab moral untuk melindungi masyarakat dari efek negatif dari manipulasi informasi. Ini termasuk mematuhi kode etik jurnalistik saat berinteraksi secara online dan offline, mengetahui batas-batas penggunaan sumber anonim, dan menangani rumor dengan bijak (McQuail, 2012) (Kusuma, 2019).

Dampak Manipulasi Informasi terhadap Opini Publik dan Persepsi Konflik

Informasi manipulatif dalam konflik sangat memengaruhi persepsi publik. Dalam konflik asimetris, pihak yang berkepentingan sering menggunakan manipulasi informasi untuk membuat cerita yang mendukung tujuan mereka, baik untuk mendapatkan dukungan maupun untuk melemahkan pihak lawan. Penyebaran berita palsu atau hoaks adalah salah satu bentuk manipulasi informasi yang dapat menimbulkan ketakutan, polarisasi sosial, dan ketegangan politik. Contoh di Indonesia, terutama selama pemilihan umum, menunjukkan bahwa media sosial dan platform digital sering digunakan untuk menyebarkan informasi yang menyesatkan untuk memengaruhi pemilih. Polarisasi sosial yang persisten dapat dipengaruhi oleh konten yang sengaja dimanipulasi untuk menimbulkan ketakutan atau menimbulkan konflik antarkelompok. Selain itu, penyebaran informasi palsu melalui media digital tidak hanya mengganggu stabilitas sosial dalam jangka pendek tetapi juga berdampak jangka panjang pada kepercayaan publik terhadap informasi yang benar. Keberadaan berita palsu atau manipulasi informasi membuat publik lebih sulit untuk mempercayai informasi yang mereka terima. Akibatnya, pemerintah dan media independen menghadapi tantangan besar dalam menjaga stabilitas sosial. Hal ini menunjukkan bahwa literasi digital dan media sangat penting karena keduanya dapat membantu masyarakat lebih kritis dalam menerima dan membagikan informasi di media sosial. Manipulasi informasi dalam konflik asimetris memiliki efek psikologis seperti ketakutan dan kebencian, yang dapat menyebabkan perpecahan dan melemahkan kohesi sosial jika berlanjut. Dengan demikian, manipulasi informasi tidak hanya menjadi alat untuk mencapai tujuan jangka pendek tetapi juga memiliki konsekuensi negatif terhadap moralitas sosial dan etis.

KESIMPULAN

Kesimpulan dari tulisan ini menunjukkan bahwa penggunaan propaganda dan manipulasi informasi oleh aktor negara dan non-negara, terutama melalui media digital, memiliki dampak signifikan terhadap persepsi publik dan dinamika konflik. Negara menggunakan propaganda untuk mempertahankan stabilitas nasional dan menciptakan citra positif di tingkat internasional, sementara aktor non-negara berupaya menarik dukungan global melalui narasi yang mengangkat isu-isu HAM dan lingkungan. Perbedaan dalam pendekatan ini menyoroti bahwa kedua pihak memiliki metode dan tujuan yang berbeda dalam upaya membentuk opini publik, terutama dalam konteks diplomasi publik. Selain itu, manipulasi informasi menimbulkan tantangan etis yang besar bagi jurnalisme dan media. Media digital yang memungkinkan penyebaran informasi tanpa verifikasi ketat memperbesar risiko penyebaran berita palsu, yang pada akhirnya menurunkan kepercayaan publik terhadap media. Jurnalis dan media memiliki tanggung jawab sosial untuk memastikan informasi yang disampaikan akurat dan melindungi masyarakat dari dampak negatif manipulasi informasi. Terakhir, manipulasi informasi dalam konflik asimetris memengaruhi stabilitas sosial dan politik dalam jangka panjang. Ketakutan dan polarisasi yang ditimbulkan oleh berita palsu atau informasi

manipulatif dapat memperlemah kohesi sosial dan memperburuk ketegangan politik. Literasi digital yang baik menjadi sangat penting agar masyarakat mampu menilai informasi secara kritis, serta mengurangi dampak manipulasi informasi yang dapat memecah-belah masyarakat. Manipulasi informasi, meskipun dapat mencapai tujuan jangka pendek, memiliki konsekuensi moral dan sosial yang signifikan dalam jangka panjang, sehingga perlu pendekatan yang bertanggung jawab dalam komunikasi publik. Dari kesimpulan diatas, peneliti dapat memberikan saran sebagai berikut pendidikan, undang-undang, dan penguatan media independen dapat melawan taktik manipulatif. Sebaliknya, untuk mengurangi dampak negatif dari manipulasi informasi terhadap opini publik dan persepsi konflik, diperlukan solusi teknologi, literasi, dan rekonsiliasi sosial. Pemerintah, masyarakat sipil, dan komunitas internasional harus bekerja sama guna menciptakan ekosistem informasi yang lebih sehat dan bertanggung jawab.

DAFTAR PUSTAKA

- Bakry, G. N. (2021). Peran pers sebagai aktor gerakan digital tagar# solidaritasuntukntt di Twitter. *Jurnal Kajian Jurnalisme*, 98-114.
- Buffaloe, D. L. (2006). *Defining Asymmetric Warfare*. The Institute Land Warfare. Papers (AUSA).
- Chakraborty, K. (2013). *Cultural Diplomacy Dictionary*. Berlin: Institute for Cultural Diplomacy.
- Clausewitz, C. (1995). *On War*.
- Dewan Riset Nasional. (2008).
- Eriyanto. (2002). *Analisis Framing: Konstruksi, Ideologi dan Politik Media*.
- Fetzer, J. H. (2004). *Disinformation: The Use of False Information*. Minds and Machines.
- Gelven, M. (1994). *War and Existence*. Philadelphia: Pennsylvania University Press.
- Handoko, Y. (2019). Peperangan Informasi dalam Era Digital. *Jurnal Komunikasi Indonesia*.
- Kusuma, A. (2019). Narasi dan Propaganda dalam Konflik Indonesia. *Jurnal Sosial Politik*, 14(3), 240-252.
- McQuail, D. (2012). *Teori Komunikasi Massa Buku 1*. Jakarta: Salemba Humanika.
- Najicha, M. R. (2020). Pengaruh Berita Hoax Terhadap Kesatuan Dan Persatuan Bangsa Indonesia. *Jurnal Kewarganegaraan*.
- Pane, F. (2018, Desember 06). Mendefinisikan OPM dan KKB. Retrieved Desember 29, 2024, from <https://m.republika.co.id>
- Paripurna, A. A. (2021). *Viktimologi dan Sistem Peradilan Pidana*. Yogyakarta: Deepublish.
- Pariser, E. (2011). *The Filter Bubble: What the Internet is Hiding from You New*. Penguin Press.
- Sabir, A. (2018). Diplomasi Publik Indonesia terhadap Vanuatu dalam Upaya Membendung Gerakan Separatisme Papua.
- Sabrina, A. R. (2018). Literasi Digital Sebagai Upaya Preventif Menanggulangi Hoax.
- Sudirman, L. &. (2017). Analisis Yuridis Terhadap Kebebasan Pers di Indonesia dan Malaysia. *Journal of Judicial*.
- Vlăduțescu, Ș. &. (2014). *Current Communication Difficulties*.
- Ward, S. J. (n.d.). *Digital Media Ethics*. Retrieved Desember 29, 2024, from <http://ethics.journalism.wisc.edu/resources/digital-media-ethics/>